

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Abdul, Khakim 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Adrian, Sutedi 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cet ke-6*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang, Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Imam, Soepomo, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet. XII, Jakarta: Djambatan.

Jum, Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Jakarta: Rajawali Pers.

Lalu, Husni, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Lalu, Husni, 2012, *Aspek-Aspek Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rachmat, Trijono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Ridwan, HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono, Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika.

Zainal, Asikin, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Zaeni, Asyhadie, 2013, *Hukum Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Skripsi

Ira Halidayati, 2014, *Pengaruh Pengawasan Internal Pengawasan dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Daerah*, Padang: Universitas Negeri Padang.

Tasyriko Fathan, 2019, *Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Provinsi pada PT. Indah Cargo Oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat*, Padang: Universitas Andalas.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan.

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
PER.02/MEN/I/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan
Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :
KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penanguhan Pelaksanaan Upah
Minimum.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :
KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia
Jasa Pekerja/Buruh.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-827-2019 tentang Upah
Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

D. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan>. Diakses pada tanggal 14 Januari
2020 Pukul 13.06

<https://wajiblapor.kemnaker.go.id>. Diakses pada tanggal 7 September 2020 Pukul
10.00 WIB

